

**Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar Dan Luar Sekolah  
Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian  
(Studi Kasus Tentang Aplikasi MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten  
Boyolali)**

*The Role of the Office of the Coordinator of Early Childhood Education in  
Primary and Non-School Education in Updating Staffing Data  
(Case Study About MySAPK Application, Klego District, Boyolali Regency)*

**Licencia Poetica Tunjung Pamungkas\*, Dr. Winarti, M.Si \*\*, Wirid  
Winduro, S.Si, M.Si\*\***

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Slamet Riyadi  
[licenciaptp@gmail.com](mailto:licenciaptp@gmail.com)

**Abstrak**

Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang wajib dilakukan Instansi Pemerintah dan merupakan sebuah upaya pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan pendataan Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan aplikasi MySAPK. MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database Pegawai Negeri Sipil secara Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Penelitian dilakukan di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, dengan informan Aparatur Sipil Negara di bawah koordinasi Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran Kantor Koordinator dalam penggunaan aplikasi MySAPK, sehingga kendala seperti update data kepegawaian dapat diminimalisir agar lebih efektif dan efisien. Penelitian menggunakan metode kualitatif sumber data primer, data sekunder, analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman antara lain pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan, untuk uji keabsahan melalui uji triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya relevansi antara teori Kuncoro (2004) dengan realitas peran sebagai koordinator, peran sebagai fasilitator dan peran sebagai stimulator sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam peran sebagai fasilitator yaitu penyediaan fasilitas jaringan internet yang lambat sehingga dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian menjadi terhambat. Perlu ada peningkatan peran sebagai fasilitator, berupa pemberian fasilitas yang memadai, seperti penambahan jaringan internet / *WIFI* agar perannya sebagai fasilitator dapat terpenuhi dan nantinya apabila ada kegiatan yang serupa program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sistem aplikasi MySAPK juga perlu diperbaiki.

Kata kunci: Peran, Pemutakhiran Data Kepegawaian , MySAPK

### *Abstract*

Updating the State Civil Apparatus Data is a mandatory thing for Government Agencies and is an effort by the government through the State Civil Service Agency to carry out data collection on the State Civil Apparatus using the MySAPK application. MySAPK is a mobile technology-based application for Civil Servants that is integrated and connected online with the National Civil Servant database for Civil Servant Profile information. The research was conducted at the Office of the Coordinator of Early Childhood Education in Elementary and Out-of-School Education, Klego District, Boyolali Regency, with State Civil Apparatus informants under the coordination of the Office of the Coordinator of Early Childhood Education in Primary and Out-of-School Education Klego District, Boyolali Regency. The purpose of this study is to describe the role of the Coordinator's Office in the use of the MySAPK application, so that obstacles such as updating staffing data can be minimized to be more effective and efficient. This study uses qualitative methods of primary data sources, secondary data, analysis of interactive model data according to Miles and Huberman, including data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions, to test the validity through triangulation test.

The results of the study indicate that there is relevance between Kuncoro's theory (2004) and the reality of the role as coordinator, role as facilitator and role as stimulator are appropriate and running well. However, there are still shortcomings in the role as a facilitator, namely the provision of slow internet network facilities so that updating personnel data is hampered. There needs to be an increased role as a facilitator, in the form of providing adequate facilities, such as adding internet/WIFI networks so that their role as facilitator can be fulfilled and later if there are similar activities the program can be carried out properly. The MySAPK application system also needs to be improved.

Key words : roles, updates of employment data, MySAPK

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang prima dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang besar secara kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, jumlah Aparatur Sipil Negara di Indonesia sebanyak 4.168.118 Pegawai Negeri Sipil berstatus aktif per 31 Desember 2020 merupakan jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem informasi kepegawaian yang handal sebagai data dasar bagi Badan Kepegawaian Negara untuk kepentingan manajemen kepegawaian secara nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Badan Kepegawaian Negara Bagian Keempat Paragraf 1 Fungsi dan Tugas Pasal 47 Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi yaitu melakukan Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara; Penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan Penyimpanan informasi pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Pasal 48 Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas yaitu Mengendalikan seleksi calon pegawai Aparatur Sipil Negara;

Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Instansi Pemerintah; Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara; Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara.

Dalam melaksanakan salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) yakni melakukan penyimpanan informasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutakhirkan oleh instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, yang diamanahkan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang wajib dilakukan Instansi Pemerintah dan merupakan sebuah upaya pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan pendataan Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan aplikasi MySAPK. Kegiatan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) merupakan pelaksanaan atau penerapan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana Badan Kepegawaian Negara diberikan kewenangan untuk menyusun serta mengatur satu data Aparatur Sipil Negara yang merupakan rangkaian informasi yang disusun secara sistematis dan terintegrasi berbasis teknologi. Penerapan Pemutakhiran Data Mandiri ini merupakan bagian dari pengembangan satu data Aparatur Sipil Negara yang akan diolah melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Badan Kepegawaian Negara sedang memproses Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara terintegrasi yang disebut dengan SIASN guna memenuhi satu data Aparatur Sipil Negara nasional dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Data terintegrasi yang tersedia minimal ada tiga komponen yang meliputi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Apabila instansi meng-*update* data itu otomatis terhubung ke Badan Kepegawaian Negara dan begitu juga sebaliknya, hal ini yang disebut dengan integrasi data. Pemutakhiran data merupakan milik dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) masing-masing.

Target Pendataan Aparatur Sipil Negara ini adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Non ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Jika data Aparatur Sipil Negara dapat dimutakhirkan akan melahirkan kualitas data yang dapat dikembangkan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan dimanfaatkan untuk pelayanan kepegawaian. Sistem Informasi

Aparatur Sipil Negara merupakan wujud percepatan realisasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Untuk melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi, Aparatur Sipil Negara dapat mengakses secara online melalui aplikasi MySAPK yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara sebagai *otentifikasi* data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPT non-ASN.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian telah dilakukan. Seperti misalnya :

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fandy Asyik hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, baik dalam proses pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data. Diharapkan BKPSDM ke depan dengan adanya kebijakan pemanfaatan SAPK sebagai proses pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Fakfak dapat terlaksana secara lebih efektif dan

efisien.

Penelitian juga telah dilakukan oleh Wasiah Sufi, Dwi Herlinda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana. Namun pada dasarnya SDM atau pengguna sistem (User) yang ada di BKD Kota Pekanbaru belum mampu menggunakan dan memanfaatkan Sistem (SAPK Online) secara maksimal.

MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database Pegawai Negeri Sipil secara Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari aplikasi MySAPK ini adalah untuk meningkatkan akurasi data kepegawaian. Melalui aplikasi MySAPK, para Pegawai Negeri Sipil dapat mengakses dan memperbaiki datanya secara langsung, dan yang paling berhak mengelola data adalah para Pegawai Negara Sipil itu sendiri.

Pemutakhiran data pegawai dalam administrasi kepegawaian berfungsi untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat, tepat dan akurat, memudahkan dan membantu kelancaran pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian serta untuk mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data selain dilakukan sendiri oleh para Aparatur Sipil Negara di Kantor

Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, perlu adanya peran dari pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kekeliruan. Dalam hal ini pihak yang terkait adalah Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan memiliki tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah awalnya bernama Unit Pelaksana Teknis Daerah atau yang biasa disingkat UPTD. UPTD merupakan suatu wadah atau organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014, dilanjutkan dengan PP nomor 18 tahun 2016 serta permendagri nomor 12 tahun 2017 serta surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 061 tertanggal 4 Desember 2017 menyebutkan bahwa tidak ada lagi UPT Pendidikan, akan tetapi kini telah berganti nama menjadi Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah.

Aparatur Sipil Negara Di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sendiri telah melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi MySAPK.

Permasalahan terjadi pada saat pemutakhiran data kepegawaian melalui MySAPK, informasi yang peneliti peroleh saat wawancara dengan Staff Umum. Beberapa permasalahan yang sempat ditemukan yaitu mayoritas jaringan internet kurang lancar dan apabila ada berkas yang belum lengkap sulit untuk memasukkannya sehingga untuk mengupload dokumen data Aparatur Sipil Negara menjadi terhambat, waktu yang terlalu singkat karena masih ada Aparatur Sipil Negara yang belum bisa melakukan pengisian pemutakhiran data kepegawaian, apalagi disaat akhir waktu pengisian pemutakhiran data kepegawaian aplikasi MySAPK tidak dapat dibuka. Lamanya waktu penyelesaian administrasi kepegawaian masih terjadi karena proses sinkronisasi data yang memerlukan waktu. Pada saat proses verifikasi Aparatur Sipil Negara banyak yang salah memasukkan unit kerja dalam pengisian pemutakhiran data kepegawaian ( Hasil wawancara pada : 14 Oktober 2021).

Penelitian ini sangat penting karena terbilang baru, sudah dilakukan penelitian sejenis karena menarik atensi peneliti lain. Namun realitas di lapangan menunjukkan, masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi MySAPK. Pemutakhiran data kepegawaian dengan aplikasi MySAPK bertujuan untuk mendapatkan base satu data secara nasional, sebagai wujud akuntabilitas pemerintah maka Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali melaksanakan peran untuk

membantu Aparatur Sipil Negara dalam menggunakan aplikasi MySAPK. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran Kantor Koordinator dalam penggunaan aplikasi MySAPK, sehingga kendala seperti terkait update data kepegawaian dapat diminimalisir agar lebih efektif dan efisien. Penelitian masih minim diteliti sehingga menarik untuk dibahas, hal ini karena MySAPK merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara. Kewajiban update data kepegawaian Aparatur Sipil Negara diterapkan untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Target Satu Data ASN sesuai Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019. Maka peneliti tertarik untuk meneliti serta membahas mengenai Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Tentang Aplikasi MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Tentang Aplikasi MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Mendeskripsikan Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Tentang

Aplikasi MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali).

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, dan menjadikan salah satu informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Administrasi Kepegawaian.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego dan ASN pada umumnya dalam upaya pemutakhiran data kepegawaian.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

Sistem administrasi kepegawaian negara baik didalam instansi pemerintah maupun swasta tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Sistem administrasi kepegawaian negara merupakan bagian dari administrasi negara yang kebijakannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap pegawai apa pun jenisnya (pegawai pusat dan daerah) adalah pegawai negeri yang mengacu pada peraturan perundangan yang sama.

Kebijakan didasarkan pada tujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan diantara pegawai sehingga pembinaannya tidak karena faktor politik. Pembinaannya terpusat sehingga memungkinkan pegawai daerah dan pusat dapat dipindah-pindahkan dari satu daerah ke daerah lainnya tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Dengan demikian pengembangan kariernya lebih terbuka, dalam sistem administasi kepegawaian diperlukan pembaharuan data untuk meningkatkan akurasi data kepegawaian. Maka dari itu melalui aplikasi MySAPK diharapkan Aparatur Sipil Negara di seluruh instansi dapat memutakhirkan data kepegawaiannya, agar data lebih akurat dan membantu memudahkan kelancaran pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.

Dalam kajian teori ini akan membahas mengenai Pengertian Peran, Teori Peran, Pengertian Peran, Pemutakhiran Data Kepegawaian, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Berdasarkan pengertian dan indikator teori menurut beberapa ahli, peneliti melakukan analisis menyesuaikan dengan realitas di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali terkait teori yang relevan sebagai kerangka berpikir pada penelitian.

##### 1. Pengertian Peran

Peran menurut Suyonto dan Burhanudin (2011:51-52) mendefinisikan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari suatu posisi, peran

berhubungan dengan pengharapan perilaku untuk posisi tertentu. Peran menurut Soerjono Soekanto (2012:212) merupakan suatu aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu kenyataan bahwa peran merupakan serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dan Sarlito (2015:215) peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah penerapan atau pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna mewujudkan suatu perubahan tertentu yang sesuai atau berdasarkan dengan kedudukan sosial yang dimiliki orang tersebut, jika seseorang tersebut telah menjalankan hak dan kewajibannya maka bisa dikatakan bahwa dia telah menjalankan perannya.

a. Teori Peran

Peran pemerintah dijabarkan oleh Gede Diva (2009:15) diwujudkan

sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator sebagai berikut :

1) Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah merencanakan arah guna menyetimbangkan penyelenggaraan pemerintah melalui penerbit peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan landasan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat.

2) Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah berperan melalui memberikan bimbingan, pengarahan secara mendalam kepada masyarakat. Umumnya pemberian bimbingan dilaksanakan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan bimbingan.

3) Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu membuat kondisi yang kondusif. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pendidikan dan peningkatan, pelatihan kepada masyarakat. Peran pemerintah sangat berpengaruh untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tentram yang merupakan kewajiban pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Peran Pemerintah menurut Munir (2010:19) Peran pemerintah yang sesuai dengan

fungsinya yaitu :

1) Entrepreneur  
Pemerintah sebagai entrepreneur yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset daerah, mengelola sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

2) Koordinator  
Sebagai koordinator pemerintah dapat menerapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadi aktor pembangunan.

3) Fasilitator  
Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu melajukan pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal yaitu berkenaan dengan perbaikan prosedur perjanjian dan pelayanan, serta melaksanakan penetapan untuk memantapkan pengaturan dalam pembangunan.

Peran pemerintah menurut Kuncoro (2004, 113-114) mencakup wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator sebagai berikut:

1) Wirausaha (entrepreneur), pemerintah sebagai wirausaha yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha bisnis. Pemerintah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis dan dapat digunakan untuk tujuan lain yang sifatnya ekonomi.

2) Koordinator, sebagai koordinator pemerintah dapat bertindak menentukan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya.

3) Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

4) Stimulator, pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk masuk dan menjaga agar rencana yang telah disusun tetap berada di daerahnya. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara misalnya : pemberian apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan kegiatan pemutakhiran data kepegawaian melalui MySAPK.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya serta memiliki tujuan yang sama dalam sebuah organisasi. Sehingga dibutuhkan indikator yang tepat guna mendeskripsikan peran-peran yang dilakukan oleh Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Dari beberapa pendapat mengenai indikator peran diatas, peneliti memilih menggunakan indikator dari

Mudrajad Kuncoro (2004: 113-114) dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu koordinator, fasilitator dan stimulator serta penentuan indikator tersebut sesuai untuk mendeskripsikan Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian ( Studi Kasus Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali ).

## 2. Pengertian Koordinasi

Koordinasi menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009 : 85), koordinasi adalah suatu kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dan menurut Yohanes Yahya (2006 : 95), koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa koordinasi merupakan pelaksanaan atau penerapan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan atau keinginan yang sama dan

menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Orang yang memiliki posisi dalam sebuah kelompok dan bertugas mengoordinasikan operasional atau kegiatan kelompok disebut sebagai koordinator.

## 3. Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian menurut M. Manullang yang dikutip oleh Anggara dalam bukunya Administrasi Kepegawaian Negara (2016:11) adalah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan adanya kepuasan hati pada diri para pegawai. Sedangkan menurut Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Anggara dalam bukunya Administrasi Kepegawaian Negara (2016:12) mengatakan bahwa: Administrasi Kepegawaian dikaji dalam kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai, itu diperoleh untuk berbagai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa administrasi kepegawaian merupakan segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia ( pegawai ) untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan, mulai dari penerimaan pegawai sampai dengan pelepasan pegawai.

## 4. Pemutakhiran Data Kepegawaian

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 Pemutakhiran Data Mandiri adalah kegiatan mengoreksi atau

menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini secara mandiri. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara (PDM ASN) sendiri adalah suatu proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik guna meningkatkan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara. Sehingga dapat menciptakan suatu aplikasi yang saling terhubung dan dapat berinteraksi dengan aplikasi lainnya, serta dapat saling bertukar informasi atau yang biasanya disebut Interoperabilitas Data.

#### 5. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)

Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Terintegrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi yang mutakhir dan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dan layanan data manajemen Aparatur Sipil

Negara. Pembangunan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara ini akan berdampak pada peningkatan pelayanan teknis kepegawaian ke depan. Targetnya layanan manajemen kepegawaian seluruhnya bisa diselesaikan tanpa memerlukan berkas fisik secara berkala karena data sudah otomatis tersimpan digital di Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

#### 6. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara *on-line* dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian. MySAPK BKN merupakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian, sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat.

#### B. Kerangka Pikir Peneliti

Penelitian ini berawal dari upaya pemerintah untuk melaksanakan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang terjadi khususnya Aparatur Sipil Negara di bawah Koordinasi PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Maka dari itu, diperlukan peran Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego dalam pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara.

Dalam mendeskripsikan peran, peneliti menggunakan indikator menurut Mudrajad Kuncoro (2004:113-114) yaitu peran sebagai wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak menggunakan indikator wirausaha (*entrepreneur*) karena Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah merupakan instansi pemerintah yang tidak mengutamakan keuntungan tetapi lebih mengutamakan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara sehingga dalam pemutakhiran data kepegawaian ini tidak ada unsur wirausaha atau tidak memiliki nilai substansi ekonomi. Pemutakhiran data kepegawaian ini sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis satu data yang akuntabel terkait pengembangan sumber daya manusia.

Alasan penulis mengambil tiga indikator tersebut karena Pemerintah dan Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah sama-sama organisasi publik dan yang melakukan ketiga peran tersebut serta indikator tersebut dipilih karena dinilai sesuai menjadi barometer untuk mendeskripsikan peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koordinator, fasilitator, dan stimulator. Sebagai koordinator yaitu mengatur dan membuat konsep kegiatan yang berkaitan dengan pemutakhiran data kepegawaian. Peran

pemerintah sebagai fasilitator dapat dilihat dari apa saja yang telah disediakan Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego dalam pemutakhiran data kepegawaian. Sebagai stimulator yaitu memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian.

#### KERANGKA PIKIR PENELITI



Gambar 1. Kerangka Pikir Peneliti

#### C. Definisi Konseptual

##### 1. Peran

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau badan untuk mewujudkan suatu

perubahan berdasarkan dengan status (kedudukan) yang dimiliki orang tersebut.

## 2. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kebijakan organisasi dan sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan suatu kebijakan.

## 3. Pemutakhiran Data Kepegawaian

Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan untuk menyesuaikan, memperbaharui data kepegawaian.

### D. Definisi Operasional

#### 1. Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah:

##### a) Sebagai Koordinator

1) Membuat aturan serta kebijakan guna mempermudah dalam kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian

2) Mengkoordinasi Aparatur Sipil Negara pada saat pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian

3) Mengatur dan menetapkan segala kegiatan dalam pemutakhiran data kepegawaian

4) Memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian

5) Memberikan informasi dalam pemutakhiran data pegawai

##### b) Sebagai Fasilitator

Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara guna mencapai tujuan pelaksanaan

pemutakhiran data kepegawaian Aparatur Sipil Negara seperti :

1) Memberikan bantuan dalam pengisian data Aparatur Sipil Negara

2) Memberikan pelatihan, bimbingan dan pengarahan secara mendalam dan efektif kepada Aparatur Sipil Negara

3) Memberikan pelayanan dalam penyampaian kendala terkait pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian

##### c) Sebagai Stimulator

1) Memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian

2) Memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang dengan cepat dan tepat dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian

3) Memberikan dan menciptakan suasana kerja yang nyaman kepada Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian

#### 2. Pemutakhiran Data Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

Pemutakhiran data kepegawaian yaitu kegiatan menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian baik data yang telah lampau maupun data

terbaru yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terpadu serta berkualitas baik guna meningkatkan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Tentang Aplikasi MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam.

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan permasalahan serta fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat menemukan data yang obyektif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan berdasarkan pada apa yang terjadi dalam proses kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian ini merupakan hal yang baru serta peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Tentang Aplikasi

MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari informan dalam penelitian ini, yang berasal dari wawancara langsung kepada Aparatur Sipil Negara Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

#### b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Pemutakhiran Data Mandiri, sumber publikasi pemerintah, situs, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai pemutakhiran data kepegawaian.

### D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Informan yang dipilih ialah orang yang mengetahui informasi, keadaan, kondisi, peristiwa, permasalahan pemutakhiran data kepegawaian yang dilaksanakan oleh Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Sehingga dari informasi yang didapat informan tersebut dapat

mendeskrripsikan peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Tentang Aplikasi MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali). Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Sarwoko, S. Sos, M. Hum Selaku Pengawas TK/SD dan Verifikator dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian
2. Ibu Budi Lestari, S. Pd, M. Si Selaku Penilik PAUD dan Verifikator dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian
3. Ibu Anindhyta Angga TMTP, S. Sos Selaku Staff Umum dan Verifikator dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian
4. Bapak Y. Dwi Purnomo, S. Pd Selaku Kepala SD / Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Bapak Sarif, S. Pd Selaku Kepala SD / Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Ibu Siti Askariyah, S. Pd Selaku Kepala TK / Aparatur Sipil Negara (ASN)
7. Ibu Daryati, S. Pd Selaku Kepala TK / Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengawas TK/SD, Penilik PAUD, Staff Umum dan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Karena Pengawas TK/SD, Penilik PAUD, dan Staff Umum merupakan informan yang mengurus terkait program pemutakhiran data kepegawaian dan paham betul seperti apa

pengimplementasian program pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi MySAPK di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Sedangkan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali merupakan sebagai pengguna aplikasi dan penerima pelayanan terkait pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi MySAPK di Kantor tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan secara sekaligus, dan masing-masing teknik saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

##### **1. Pengamatan (Observasi)**

Observasi yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian merupakan pengamatan secara langsung pada Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi open-ended (terbuka) tentang peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, permasalahan yang timbul, dan deskripsi lokasi penelitian.

##### **2. Wawancara**

Sumber data wawancara dalam penelitian ini bersumber dari Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Staff Umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021. Dimana tujuan peneliti melakukan wawancara pada informan tersebut untuk dapat memperoleh informasi terkait penelitian ini mengenai bagaimana peran yang diberikan oleh Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan misalnya seperti aktivitas yang dilakukan pihak Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Adapun bentuk teknik pengumpulan data secara dokumentasi adalah gambar visi-misi Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan wawancara secara langsung dengan Staff Umum, serta struktur organisasi.

### F. Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dari sumber, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data saat pengumpulan informasi.

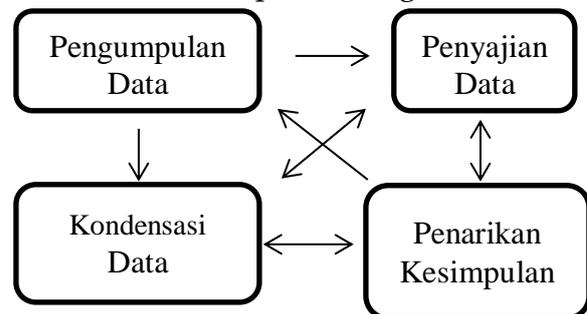
Teknik yang digunakan untuk menguji validitas data pada

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

### G. Analisis Data

Data dianalisis dengan beberapa langkah menggunakan teori Miles, Huberman dalam Saldana (2014 : 14) yaitu menganalisis data dengan empat langkah: pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pengerucutan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data (dikutip dari jurnal Andi misna, 2015).

Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dalam Saldana (2014) akan diterapkan sebagai berikut:



Sumber: Miles, Huberman (Miles, Huberman dalam Saldana,2014:14)

Gambar 2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan mengamati, memilah-milah, merangkum dan mengkategorikan seluruh data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut berupa foto, gambar, fenomena sehari-hari yang dibutuhkan dalam penelitian di Kantor Koodinator PAUD Pendidikan

Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

b. Kondensasi Data

Miles dan Huberman (2014 : 10) Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan, maupun transkrip wawancara, dokumen, dan data empiris dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pemilihan

Pada proses ini semua data yang ada dikumpulkan mengenai Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian.

b. Pengerucutan

Miles dan Huberman (2014:19) peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian mengenai Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian. Tahap ini merupakan kesinambungan dari tahap seleksi data. Peneliti membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

c. Peringkasan

Pada tahap ini data yang telah terkumpul mengenai Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan

Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian dievaluasi khususnya yang berhubungan dengan kualitas dan cukupan data.

d. Penyederhanaan dan Transformasi

Data realitas konteks sosial penelitian mengenai Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian disederhanakan dan ditransformasikan agar mudah dipahami.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini dituangkan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Selanjutnya penelitian mengenai peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dalam pemutakhiran data kepegawaian, diolah sesuai dengan indikator yaitu koordinator, fasilitator dan stimulator.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilaksanakan serta mengecek ulang, peneliti mengambil kesimpulan terkait Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid serta studi lapangan yang telah dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI

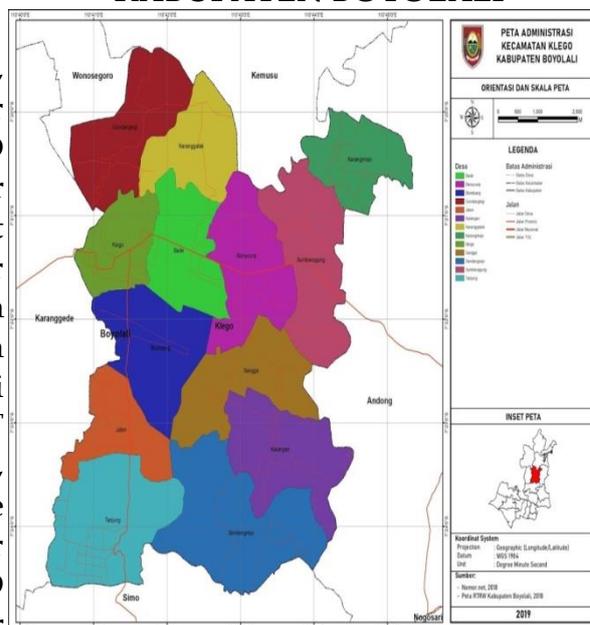
### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 1. Identitas Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Klego sebagai tempat penelitian. Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali ini berlokasi di desa Klego RT 003/RW 01, Klego, Klego, Boyolali. Jawa Tengah. Kode Pos. 57385. Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Klego berjarak 20 meter dari Kecamatan Klego dan berjarak 28 km dari Kabupaten Boyolali

#### 2. Sejarah Lokasi Penelitian

Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014, dilanjutkan dengan PP nomor 18 tahun 2016 serta permendagri nomor 12 tahun 2017 serta surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 061 tertanggal 4 Desember 2017 menyebutkan bahwa tidak ada lagi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, akan tetapi kini telah berganti nama menjadi Kantor Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah. Pada awalnya kantor tersebut bernama Unit Pelaksana Teknis Daerah atau yang biasa disingkat UPTD.



Sumber: <https://neededthing.blogspot.com/2019/12/peta-administrasi-kecamatan-klego.html>

Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

#### 3. Visi dan Misi

Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

##### a) Visi

Terwujudnya layanan pendidikan yang kondusif dan berkualitas dengan guru yang kompeten dan inspiratif, serta dukungan warga yang peduli untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan berkepribadian.

##### b) Misi

- 1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas hingga merata dan berkelanjutan, didukung oleh

infrastruktur dan Garis Koordinasi / Kerjasama : - - - - -  
teknologi Sumber : Kantor Koordinator PAUD  
2) Mewujudkan Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah  
pelestarian dan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali  
pemajuan Gambar 4 : Struktur Organisasi Kantor  
kebudayaan serta Koordinator PAUD Pendidikan Dasar  
pengembangan dan Luar Sekolah Kecamatan Klego  
bahasa dan sastra Kabupaten Boyolali

#### 4. Struktur Organisasi

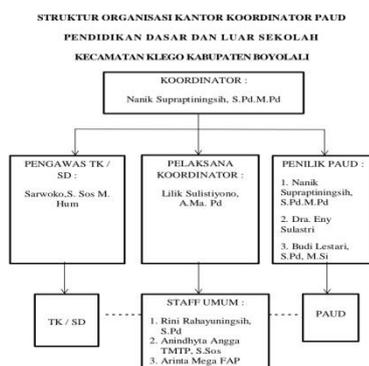
Struktur organisasi Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Terdiri dari :

- a) Koordinator
- b) Pengawas TK/SD
- c) Penilik PAUD
- d) Pelaksana Koordinator
- e) Staff Umum

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah :

- a) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan;
- b) Mengelola urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c) Mengelola keuangan;
- d) Mengkoordinasi dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- i) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- j) Mengoordinasikan dan melakukan kerjasama dengan dinas/badan lainnya;

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KOORDINATOR PAUD PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR SEKOLAH KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI



Ket :  
Garis Komando / Perintah : \_\_\_\_\_

- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- l) Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD; dan
- m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

#### 5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara, maka dilengkapi sarana dan prasarana, antara lain :

- a) Jaringan Internet / *WIFI*  
Jaringan Internet / *WIFI* dapat digunakan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pemutakhiran data kepegawaian di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.
- b) Laptop  
Laptop yang ada di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali ada 5 buah laptop, yang berfungsi 4 buah. Laptop tersebut dapat digunakan dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian.
- c) Komputer  
Komputer yang terdapat di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali ada 3 buah dan yang berfungsi ada 2 buah. Komputer tersebut dapat digunakan

dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian.

#### d) Aula

Aula di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah dapat digunakan untuk tempat melakukan pemutakhiran data kepegawaian.

#### B. Pembahasan

Dalam pembahasan untuk mendeskripsikan Peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah dalam Pemutakhiran Data Kepegawaian (Studi Kasus Tentang Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian MySAPK Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali), peneliti menggunakan indikator menurut Mudrajad Kuncoro (2004:113-114) yaitu peran sebagai Koordinator, Fasilitator, dan Stimulator. Terkait hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Peran sebagai Koordinator, sebagai koordinator pemerintah dapat bertindak menentukan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan mengenai Peran Sebagai Koordinator dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali yaitu :
  - a. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Kantor Koordinator melakukan sosialisasi dan kerjasama antara pegawai Kantor

- dengan Aparatur Sipil Negara untuk mempermudah kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian.
- b. Berdasarkan hasil penelitian Kantor Koordinator melakukan koordinasi dengan Aparatur Sipil Negara, dengan cara pemberian sosialisasi yang diadakan 2-3 kali dan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menggunakan aplikasi *WhatsApp (WA)*.
  - c. Kantor Koordinator mengatur dan menetapkan kegiatan pemutakhiran data kepegawaian dengan mengadakan sosialisasi dan dibuat tim agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian dilakukan secara mandiri oleh Aparatur Sipil Negara masing-masing namun sebagian juga dibantu oleh Operator Sekolah dan pegawai Kantor Koordinator.
  - d. Pegawai Kantor Koordinator memberikan informasi kepada Aparatur Sipil Negara terkait dengan pemutakhiran data kepegawaian.  
Elaborasi perspektif peneliti dalam menganalisis relevansi peran sebagai koordinator antara teori dan realitas yang ada dilapangan meliputi membuat aturan serta kebijakan, mengkoordinasi Aparatur Sipil Negara,

- mengatur dan menetapkan segala kegiatan dalam pemutakhiran data kepegawaian, memberikan sosialisasi dan bekerjasama antara pegawai kantor dengan Aparatur Sipil Negara, dan memberikan informasi kepada Aparatur Sipil Negara terkait Pemutakhiran Data Kepegawaian. Indikator dalam teori Mudrajad Kuncoro (2004: 113-114) dan peran dalam kegiatan pemutakhiran data kepegawaian di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, secara keseluruhan sesuai atau relevan antara teori maupun realitas yang ada dilapangan pada saat kegiatan penelitian berlangsung.
2. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan mengenai Fasilitator dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali yaitu :
    - a. Kantor Koordinator menyediakan fasilitas berupa membantu Aparatur Sipil Negara yang kesulitan atau tidak dapat melakukan pengisian data secara mandiri, menyediakan jaringan internet (*wifi*) akan

- tetapi belum memadai karena hanya ada 1 lokal jaringan internet, sehingga apabila dipakai untuk banyak orang menjadi lambat.
- b. Kantor Koordinator memberikan pelatihan, bimbingan dan pengarahan tentang cara melakukan pengisian data aplikasi MySAPK kepada Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya pelatihan, bimbingan dan pengarahan akan memudahkan dan mempercepat proses pengisian data melalui MySAPK.
  - c. Dalam merespon keluhan Aparatur Sipil Negara ditanggapi dengan baik. Segala permasalahan ditampung dan diselesaikan bersama-sama. Kantor juga berperan sebagai komunikator, memberikan masukan kepada Aparatur Sipil Negara.
  - d. Kantor Koordinator telah memberikan pendampingan kepada Aparatur Sipil Negara baik secara langsung maupun tidak langsung dan sesuai dengan buku petunjuk dan buku saku aplikasi SAPK.
  - e. Kantor Koordinator menciptakan suasana kerja yang nyaman seperti menghargai pendapat antar sesama pegawai maupun dari Aparatur Sipil Negara, memberi dukungan dan arahan yang jelas serta memberikan pelayanan dengan sangat ramah dan

efektif sehingga otomatis menciptakan suasana yang nyaman.

- Elaborasi perspektif peneliti dalam menganalisis relevansi peran sebagai fasilitator antara teori dan realitas yang ada dilapangan meliputi menyediakan fasilitas yang memadai untuk Aparatur Sipil Negara seperti bantuan dalam pengisian data kepegawaian, penyediaan jaringan internet, memberikan pelatihan, bimbingan dan pengarahan, memberikan pelayanan dalam penyampaian kendala, memberikan pendampingan serta menciptakan suasana kerja yang nyaman. Indikator dalam teori Mudrajad Kuncoro (2004: 113-114) dan peran dalam kegiatan pemutakhiran data kepegawaian di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, secara keseluruhan sesuai atau relevan antara teori maupun realitas yang ada dilapangan pada saat kegiatan penelitian berlangsung akan tetapi masih ada kekurangan dalam penyediaan fasilitas yaitu jaringan internet yang lambat. Sehingga dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian menjadi terhambat. Hal ini perlu ditingkatkan lagi, karena jika ada kegiatan yang serupa diharapkan kedepannya dapat berjalan lebih baik daripada sebelumnya.
3. Stimulator, pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan melalui

tindakan khusus yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk masuk dan menjaga agar rencana yang telah disusun tetap berada di daerahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan mengenai Peran Sebagai Stimulator dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali yaitu :

- a. Memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi MySAPK yaitu dengan cara selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan Aparatur Sipil Negara, diberikan motivasi ucapan semangat.
- b. Berdasarkan hasil wawancara Kantor Koordinator memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara seperti ucapan selamat, terimakasih karena Aparatur Sipil Negara telah menyelesaikan kegiatan pemutakhiran data dengan baik dan tentunya program pemerintah dapat terselesaikan dengan baik pula.
- c. Berdasarkan hasil wawancara Kantor Koordinator telah membangun hubungan yang erat dengan Aparatur Sipil Negara. Yaitu dengan cara selalu berkomunikasi,

meluangkan waktu untuk ASN yang membutuhkan bantuan, dan tentunya dengan membangun hubungan yang baik, erat pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian dapat terselesaikan dengan baik.

Elaborasi perspektif peneliti dalam menganalisis relevansi peran sebagai koordinator antara teori dan realitas yang ada dilapangan meliputi pemberian motivasi yang diberikan pihak Kantor Koordinator dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan hasil kerja lebih maksimal dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian. Pemberian apresiasi pun tak lupa pegawai kantor berikan kepada Aparatur Sipil Negara, karena hal itu dapat membangkitkan semangat yang ada dalam diri Aparatur Sipil Negara. Pihak Kantor Koordinator membangun hubungan yang erat yaitu dengan cara selalu berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, meluangkan waktu untuk membantu Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan bantuan. Indikator dalam teori Mudrajad Kuncoro (2004: 113-114) dan peran dalam kegiatan pemutakhiran data kepegawaian di Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, secara keseluruhan sesuai atau relevan antara teori maupun realitas yang ada dilapangan pada saat kegiatan

penelitian berlangsung.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat dideskripsikan bahwa peran Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dengan menggunakan indikator koordinator, fasilitator, dan stimulator yang telah dikemukakan oleh Kuncoro (2004, 113-114).

1. Peran sebagai Koordinator, Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah telah berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam membuat aturan guna mempermudah kegiatan pemutakhiran data kepegawaian, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pemutakhiran data kepegawaian, mengatur dan menetapkan segala kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data, melakukan sosialisasi, serta memberikan informasi terkait pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian.
2. Peran sebagai Fasilitator, Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah telah memberikan fasilitas dalam pemutakhiran data kepegawaian, berupa pelatihan, bimbingan dan pengarahan, memfasilitasi dalam penyampaian keluhan, memberikan pendampingan dalam pemutakhiran data kepegawaian, dan

memberikan serta menciptakan suasana kerja yang nyaman.

3. Peran sebagai Stimulator, Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah telah menstimulasi atau mendukung pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui tindakan khusus agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, berupa memberikan motivasi, memberikan apresiasi dan membangun hubungan yang erat dengan Aparatur Sipil Negara.

Selain pegawai Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali yang berperan dalam kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian, Operator Sekolah juga turut andil dalam membantu Aparatur Sipil Negara. Para Operator Sekolah juga membantu melakukan pengisian data melalui aplikasi MySAPK, terutama bagi Aparatur Sipil Negara yang usianya sudah tidak muda lagi dan tidak dapat mengoperasikan IT. Untuk Aparatur Sipil Negara yang kesulitan melakukan Pemutakhiran Data secara mandiri, mereka dapat meminta bantuan dalam melakukan pengisian data. Baik dari pegawai Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, maupun Operator Sekolah masing-masing dengan mengumpulkan berkas yang diperlukan dalam pengisian data Pemutakhiran Data Kepegawaian.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, sudah memberikan peran dalam pemutakhiran data kepegawaian sebagai Koordinator, Fasilitator dan Stimulator. Untuk peran sebagai Koordinator dan Stimulator sudah baik, seperti pemberian sosialisasi, selalu memberikan informasi terbaru kepada Aparatur Sipil Negara, memberikan pendampingan dapat dipertahankan agar kedepannya tetap baik. Namun dalam peran yang sudah diberikan tersebut masih terdapat kekurangan, perlu ada peningkatan peran sebagai Fasilitator, yaitu :

1. Berupa pemberian fasilitas yang memadai, seperti penambahan jaringan internet / WIFI karena fasilitas tersebut belum memadai dan hanya ada 1 lokal jaringan internet, jika digunakan lebih dari 10 orang jaringan menjadi lambat. Sehingga hal ini sangat diperlukan untuk Kantor Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, agar perannya sebagai Fasilitator dapat terpenuhi dan nantinya apabila ada kegiatan yang serupa program tersebut dapat terlaksana dengan baik.
2. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi agar Aparatur Sipil Negara dapat benar-benar memahami pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data kepegawaian.

3. Memberikan bantuan pengisian data untuk Aparatur Sipil Negara yang sudah tua atau tidak dapat melakukan pemutakhiran data kepegawaian.
4. Untuk sistem aplikasi MySAPK juga perlu diperbaiki, karena pada saat melakukan pengisian data sempat terjadi kendala yaitu data belum sempat dimasukkan tetapi sudah hijau (sudah selesai).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Mughtar, Suwarma. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Gelar Pustaka Mandiri.
- Berry, David. (2009). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malayu, SP. Hasibuan. 2009. *Manajemen Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. *Perilaku Organisasi (cetakan Pertama)*. Jakarta: PT Buku Seru
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Undang-Undang Kepegawaian Negara*. E-Book. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/11015/1/1.%20BUKU%20ADMINISTRASI%20KEPEGAWAIAN%20NEGARA.pdf>
- Asyik, Muhammad Fandy, dkk. 2021. *Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. E-Journal, Papua Barat. Diakses dari <http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/369>
- Sufi, Wasiah, Dwi Herlinda. 2017. *Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru*, E-Journal, Universitas Lancang Kuning. Diakses dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nya/article/view/2103/1313> Skripsi, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diakses dari <http://eprints.umpo.ac.id/5520/>
- Wijayanti, Sisworini Karya, 2019, *Peran KPU Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Skripsi. Universitas Slamet Riyadi
- Wijayanto, Hargo Dwi, 2019, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Magetan*. Skripsi (S1) thesis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Yani, Ahmad. 2017. *Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Penanggulangan Banjir di Kota Binjai*. Tesis, Medan: Universitas Medan Area. Diakses dari [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1522/5/151801172\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1522/5/151801172_file%205.pdf)
- Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 *tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil*. Diakses dari <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PERKA-BKN-NOMOR-14-TAHUN-2011-PEDOMAN-PENGEMBANGAN-DATABASE-PNS.pdf>
- Badan Kepegawaian Negara, Putusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 *tentang Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara*. Diakses dari <https://pdm-asn.bkn.go.id/img/Kepka%20PDM.pdf>
- Badan Keuangan Negara, (2020). *Instansi Pemerintah Wajib Mutakhirkan Data Pegawai melalui SI-ASN*. Jakarta. Diakses dari <https://www.bkn.go.id/berita/instansi-pemerintah-wajib-mutakhirkan-data-pegawai-melalui-si-asn>
- Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 *tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111315/permendagri-no-12-tahun-2017>
- Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134462/pp-no-17-tahun-2020>
- Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 *tentang Satu Data Indonesia*. Diakses dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>

Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 *tentang Aparatur Sipil Negara*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *tentang Aparatur Sipil Negara*. Diakses dari [https://www.sdm.kemenkeu.go.id/peraturan/doc/UU\\_NO\\_5\\_2014.PDF](https://www.sdm.kemenkeu.go.id/peraturan/doc/UU_NO_5_2014.PDF)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 *tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Diakses dari <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-95-tahun-2018-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik>

#### Website

Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, (2021). *Peremajaan Data Mandiri ASN Nasional 2021, Segera Aktivasi Akun MySAPK*. Diakses dari: <https://setjen.pu.go.id/bko/news/peremajaan-data-mandiri-asn-nasional-2021-segera-aktivasi-akun-mysapk>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Undang-undang Nomor 23